

## FENOMENA GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN KAPUAS

Sriyana, Mardani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya  
(email: riyan\_pgri@yahoo.com)

### Abstract

*The aim of this research is to know (1) white group description in general election of member of legislative year 2014 at Kapuas Regency, and (2) factors that cause white group in legislative election year 2014 in Kapuas Regency. The data collection techniques used in this study are observation, interview and documentation. While the analytical technique used is qualitative analysis. The conclusion of the research result is (1) the image of golput in legislative election year 2014 in Kapuas Regency consists of ideological golput, political golput and pragmatic golput (2) While the factors that cause the golput consists of three factors, namely socio-economic factors, psychological factors and rational factors. Based on the above conclusions, it can be suggested: (1) to overcome ideological ideals can be done by improving the image of government in the eyes of society and persuasive approach, (2) to overcome political golput can be done by providing a more convincing representation of legislative candidates (3) to overcome pragmatic targets can be done by simultaneous general election of legislative members to overcome voter saturation, and continue to socialize and educate politics; (4) to overcome socio-economic factors; (5) to deal with psychological factors better if political parties that follow the electoral process improve the quality of cadres and the quality of political parties, and (6) to overcome the rational factors should be Kapuas District Election Commission continues to socialize and educate politics on the importance of political participation of the community, and cooperate with the Election Supervisory Board to take firm action against money politic practice.*

**Keywords:** *Phenomenon, White Class*

### Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun sebagai Presiden dan wakil

presien. Undang-undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi politik. Pemilu dilaksanakan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia meskipun di beberapa daerah-daerah tertentu harus menyusul akibat keterlambatan logistik yang sampai ke daerah pemilihan.

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hak untuk memilih wakil rakyat atau presiden/wakil presiden sepenuhnya adalah hak asasi subyektif dari setiap individu. Penggunaannya tidak boleh diintervensi oleh siapapun, baik itu negara maupun masyarakat.

Setiap warga negara secara personal bebas menentukan penggunaan hak memilihnya, tanpa takut terhadap ancaman dalam bentuk apapun. Pemenuhan hak tersebut dijamin oleh undang-undang. Untuk itu, negara harus melindungi hak politik warga negara itu dari berbagai ancaman yang berasal dari kelompok masyarakat atau institusi negara. Jaminan perlindungan itulah yang akan menentukan kualitas pemilu.

Pemenuhan hak untuk menggunakan suara dalam Pemilu merupakan hak asasi manusia. Dan untuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, pemenuhan tersebut sudah semestinya dijamin oleh undang-undang. Dalam hal ini Komnas Hak Asasi Manusia beranggapan, hak memberikan suara dalam pemilu juga memberikan hak kepada pemilihnya untuk menggunakannya ataupun tidak. Dengan demikian, setiap orang bebas menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya itu. Masyarakat atau negara tidak dapat membatasi hak itu dengan melarang, mengkriminalkan atau menjatuhkan sanksi moral terhadap orang yang tidak menggunakan haknya tersebut.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pemilu adalah tingginya jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. Hal ini karena pemilu merupakan instrumen utama bagi terlaksananya dukungan rakyat dalam suatu demokrasi perwakilan. Pemilihan umum menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan memiliki

kepercayaan dari rakyat dan bahwa rakyat memberikan jaminan dukungan bagi para politisi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan perubahan situasi dan kondisi.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Dalam perspektif berdemokrasi, tentunya sikap golput akan berimplikasi pada pembangunan kualitas demokrasi, sehingga perlu demokratisasi dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2014.

Dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi politik pemilih, atau mulai meningkatnya golongan putih (golput), dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dengan tingkat partisipasi politik pemilih tertinggi 96,6% pada pemilihan umum tahun 1971. Lebih-lebih jika dinilai dengan penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) sebagai bagian dari Pemilu yang telah berlangsung di beberapa daerah, terutama di wilayah Jawa sebagai konsentrasi mayoritas penduduk Indonesia juga menunjukkan potensi golongan putih (Golput) yang besar berkisar 32% sampai 41,5%.

Realitas tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, di saat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya. Fenomena tersebut sepertinya menguatkan pernyataan Anthony Giddens (1999) dalam bukunya *Runaway World, How Globalisation is Reshaping Our Lives*. “haruskah kita menerima lembaga-lembaga demokrasi tersingkir dari titik di mana demokrasi sedang marak”. Tentunya potensi Golput dalam pesta demokrasi nasional maupun lokal tersebut kiranya cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas. Sebab potensi Golput yang menunjukkan eskalasi peningkatan dapat berimplikasi melumpuhkan demokrasi, karena merosotnya kredibilitas kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi pemilih diantaranya sosialisasi pemilih serta perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa berita pada situs resmi KPU. Kegiatan ini bertujuan selain meningkatkan partisipasi politik masyarakat juga dalam rangka menekan angka golongan putih (golput).

Golongan putih (golput) telah menjadi fenomena politik yang menarik di Kabupaten Kapuas. Golput diartikan sebagai pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain. Terdapat sejumlah analisis untuk menjelaskan pertanyaan mengapa terdapat fenomena golput di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa ahli sering mengidentikan golput dengan apatisme. Apatisme adalah ketidakpedulian individu dimana mereka tidak memiliki minat atau

tidak adanya perhatian terhadap aspek-aspek tertentu seperti kehidupan sosial maupun aspek fisik dan emosional. Apatis adalah istilah lain untuk sifat pasif, tunduk bahkan mati rasa terutama terhadap hal-hal yang menyangkut isu sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik.

Gejala dari sifat apatis dapat dilihat dari kurangnya kesadaran, kepedulian dan bahkan sifat tidak tanggung jawab sosial yang dapat berpengaruh kepada pemungutan suara. Hal itu terlihat jelas khususnya pada individu yang berumur 17-24 tahun. Selain itu, apatisme politik juga merupakan hasil dari dominasi politik beberapa politisi yang lebih memperhatikan karir politiknya tanpa melihat apa yang terjadi pada negaranya secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat khususnya remaja pada umumnya tidak lagi tertarik pada politik. Hal tersebut juga terjadi pada pemilih di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemilih di Kabupaten Kapuas yang memilih untuk golput bisa dikarenakan ketidakpercayaan pada kader-kader partai politik (parpol) yang sekarang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Selain itu juga bisa disebabkan oleh calon anggota legislatif yang maju dalam pemilu tidak memenuhi harapan masyarakat karena masyarakat merasa kapok karena sering merasa dibohongi, calon anggota legislatif sering ingkar janji sehingga tidak bisa dipercaya.

Lebih menyedihkan lagi, peran parpol sejak tahap pengorganisasian internal, penyerapan dan pelaksanaan aspirasi masyarakat, sampai dengan kemampuan mereka dalam mengambil jarak terhadap kebijakan pemerintah sebagai pengoreksi juga sangat rendah. Yang terjadi, parpol malah menjadi pemberi stempel dengan melegitimasi kepentingan penguasa. Akibat semua itu sangat wajar jika kini semakin

banyak masyarakat yang lebih senang berdiam di rumah atau mengerjakan hal lain ketimbang datang ke tempat pemungutan suara. Fenomena ini bisa menjadi bukti telah terjadi krisis kepercayaan di dalam diri masyarakat terhadap parpol yang menyebabkan timbulnya sikap apatis sehingga memilih untuk golput dalam pemilihan umum anggota legislatif di Kabupaten Kapuas.

Partisipasi politik yang meluas di masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah diartikan dalam berbagai arti, apakah partisipasi politik itu hanya perilaku atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi masyarakat dalam bidang politik.

Menurut Sastroatmojo (1995:67) bahwa: "Partisipasi politik pada hakekatnya merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik". Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan sebagai warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Partisipasi warga negara dalam masyarakat yang demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab. Partisipasi semacam itu memerlukan (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu, dan (4) komitmen yang

benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi.

Bentuk partisipasi politik seseorang dapat dilihat dengan jelas melalui aktivitas-aktivitas politiknya, begitu juga dalam masyarakat dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan bersama oleh masyarakat berdasarkan pendapat Mas'ood dan MacAndrews (2001:47):

Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal maupun yang illegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional adalah pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan bentuk partisipasi politik Non konvensional adalah Pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta-benda (perusakan, pengeboman, pembakaran), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya dan revolusi.

Anggota legislatif adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas mengawasi birokrasi dalam menggerakkan jalannya roda pemerintahan yang berfungsi sebagai perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Istilah jabatan *public* mengandung arti bahwa anggota legislatif menjalankan fungsi pengambilan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, anggota legislatif harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan kepercayaan

yang telah diberikan oleh rakyat. Jabatan politik bermakna bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan dengan mekanisme politik yaitu, melalui pemilihan yang melibatkan elemen politik, yaitu rakyat dan partai politik. Menurut Prihatmoko (2005:200) bahwa: “Pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu, penyeleksian rakyat terhadap tokoh – tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, ataupun Walikota/ Wakil Walikota. Aktor utama sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat, partai politik dan calon kepala daerah”.

Sebagai suatu sistem, sistem pemilihan anggota legislatif mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder atau sub-sub sistem. Bagian tersebut adalah *electoral Regulation*, *Electoral process*, dan *electoral Law Enforcement*. *Electoral regulation* adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pemilihan kepala daerah yang berlaku bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon dan pemilih dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing. *Electoral process* adalah seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan pemilihan kepala daerah yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik bersifat legal maupun teknis. *Electoral law enforcement* adalah penegakan hukum terhadap aturan-aturan pemilihan kepala daerah baik politisi, administrasi atau pidana. Ketiga bagian ini dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan proses pemilihan.

Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman Orde Baru tahun 1971. Pemrakarsa sikap untuk tidak memilih itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam Maluju Sumali. Langkah mereka didasari pada

pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak (Putra, 2003:104).

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh para pengamat atau penyelenggara pemilu tentang penyebab adanya golput: *Pertama*, administratif. Seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi seperti tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan sebagainya. *Kedua*, teknis. Seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan dan sebagainya. *Ketiga*, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (*political engagement*). Seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik dengan politik, acuh dan tidak memandang Pemilu atau Pilkada sebagai hal yang penting. *Keempat*, kalkulasi rasional. Pemilih memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena secara sadar memang memutuskan untuk tidak memilih.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran golongan putih dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Kapuas?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya golongan putih dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Kapuas?

### Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kapuas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini untuk menghasilkan temuan atau kebenaran,

dimana dalam penelitian kualitatif disebut sebagai kebenaran Intersubjektif. Kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama, seperti budaya. Realitas kebenaran dalam hal ini adalah sesuatu yang dipersepsikan, bukan sekedar fakta yang bebas dari konteks dan interpretasi apapun. Kebenaran juga merupakan bangunan (konstruksi) yang disusun oleh peneliti dengan cara mencatat dan memahami apa yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan.

Untuk mengumpulkan data dan informasi maka diperlukan informan yang menjadi subyek penelitian. Adapun informan yang menjadi subjek penelitian adalah: masyarakat Kabupaten Kapuas yang telah memiliki hak untuk memilih pada pemilu anggota legislatif tahun 2014.

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data merupakan penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca dan diinterpretasikan. Pertama kali peneliti ke lapangan dengan mengadakan observasi yang merupakan tahap pengumpulan data, setelah dikumpulkan maka direduksi data dan kemudian disajikan dan dilanjutkan kesimpulan data mengenai fenomena golput dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Kapuas.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Golongan Putih Ideologis

Gambaran golongan putih (golput) dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Kapuas secara ideologis terdapat masyarakat yang berada dalam jenis golput ideologis dimana mereka sudah tidak percaya dengan sistem demokrasi yang dianut oleh negara dan memilih untuk golput. Mereka juga

cenderung melihat sisi negatif dari sistem pemerintahan serta para pemimpin yang menurut mereka tidak sesuai dalam menjalankan pemerintahan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa walaupun golput ideologis terbilang sebagai jenis golput yang minoritas namun keberadaannya di tengah jenis golput yang terdapat di Kabupaten Kapuas hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Beberapa informan yang memberikan pernyataan dapat mengacu dan searah pada golput ideologis ini sehingga dapat disimpulkan bahwa golput ideologis juga terdapat di kalangan masyarakat Kabupaten Kapuas.

Indra J. Piliang menyatakan Dalam buku *Political Explore*, bahwa golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-state, ketika state dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu.

### 2. Golongan Putih Politis

Pada pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Kapuas yang diikuti sebanyak 415 Orang, terdiri dari 249 Laki-

laki dan 166 Perempuan. Para Caleg dari 12 Partai Politik Peserta pemilu 2014 tersebut akan memperebutkan 40 Kursi DPRD Kabupaten Kapuas pada 5 (lima) Daerah Pemilihan. Banyaknya calon yang ditawarkan pada pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Kapuas sebagian masyarakat malah menganggap ini cukup sulit untuk mengenali tiap-tiap kandidat. Terjadi kebingungan dalam masyarakat yang berdampak cukup negatif terhadap partisipasinya pada pemilihan anggota legislatif Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa masyarakat memiliki sikap politik yang jelas bahkan mereka yang golput memiliki alasan yang jelas mengapa mereka memilih untuk golput. Figur yang didambakan oleh masyarakat belum tercermin dalam calon anggota legislatif yang mengajukan diri dalam pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Kapuas, sehingga masyarakat merasa kurangnya kedekatan dengan calon anggota legislatif yang akan mereka pilih dan akan mewakili mereka selama satu periode ke depan. Golput dalam kategori ini seperti halnya yang dikatakan oleh Eep Saefullah Fatah dalam golongan golput politis.

Demikian pula yang dikemukakan oleh Indra J Piliang dalam *Political Xplore* yakni dalam pembagiannya tentang golput, golongan ini termasuk dalam bagian masyarakat yang golput politis. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebelumnya dimana informan tersebut sesungguhnya masih percaya pada negara juga pada pemilu, namun mereka kecewa terhadap cara kampanye yang dilakukan oleh calon. Para calon yang berkampanye hanya berdiri di atas mobil sambil melambaikan tangan dengan melakukan konvoi di daerah Kabupaten Kapuas. Masyarakat ingin lebih mengenal calon-

calon yang ada dan mereka berharap para kandidat akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat pula ketokohan yang dijadikan standarisasi oleh pemilih. Masyarakat cukup terkesan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Jokowi sehingga mereka mengharapkan hal yang sama terhadap para kandidat yang ada di pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Kapuas. Namun ketika mereka tidak menemukan sosok yang serupa ataupun mendekatinya mereka akan lebih memilih untuk golput.

Kebingungan yang dialami masyarakat dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 Kabupaten Kapuas bukan dikarenakan mereka tak ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik namun mereka tidak sempat mengenal satu per satu calon yang maju dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 Kabupaten Kapuas. Masyarakat mungkin dapat mengenali hanya nama serta nomor urut dari calon tertentu namun tidak mengenal secara mendalam visi dan misi apa yang diajukan oleh masing-masing umum anggota legislatif Kabupaten Kapuas sehingga mereka mengalami kebingungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa tingginya angka golput juga diakibatkan oleh kebingungan masyarakat itu sendiri meskipun hal tersebut hanya terjadi pada kalangan minoritas dan masyarakat yang kurang berpendidikan. Hal ini digolongkan dalam golput politis oleh Eep Saefulloh Fatah. Dalam golput politis yang dikemukakan oleh Eep masyarakat yang tidak mempunyai pilihan dari calon anggota legislatif yang tersedia sehingga menyebabkan mereka golput. Meskipun golput dalam golongan ini terbilang

kelompok minoritas namun hal tersebut tak boleh luput dari perhatian.

### 3. Golongan Putih Pragmatis

Dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Kapuas terdapat beberapa alasan pemilih yang enggan menggunakan hak pilihnya dengan alasan terlalu banyak pemilu yang diselenggarakan. Terjadi kejenuhan memilih di kalangan masyarakat yang merasa bahwa pemilu yang diadakan terlalu banyak dan beranggapan bahwa seharusnya pemilu dilaksanakan secara serentak.

Hasil wawancara di atas terlihat jelas salah satu alasan masyarakat tidak memilih karena jenuh terhadap pemilihan. Namun pada hasil wawancara tersebut juga terdapat sifat apatis yang di tunjukkan oleh informan. Masyarakat beranggapan bahwa suara mereka tidak terlalu penting dalam pemilihan. Mereka merasa tidak akan mempengaruhi jalannya pemilihan umum apabila hanya satu suara yang tidak ikut dalam pemilihan hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rosenberg sebagai salah satu alasan mengapa seseorang enggan untuk memilih yakni mereka beranggapan bahwa ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik tidak akan mempengaruhi pribadi mereka.

Masyarakat dalam golongan ini pula yang di maksud oleh Indra J Piliang dalam *Political Xplore* sebagai golput pragmatis, yakni masyarakat yang mengkalkulasi untung dan rugi yang mereka peroleh bila mengikuti pemilu. Mereka cenderung memandang setengah-setengah dalam proses pemilu yang diselenggarakan.

Masyarakat juga cenderung tidak memilih dikarenakan kejenuhan yang terjadi. Banyaknya pemilu yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang

berdekatan menjadi penyebab utama terjadinya kejenuhan. Tidak jarang pula masyarakat yang golput bingung dengan pemilu yang diadakan. Mereka sering beranggapan bahwa pemilu yang diadakan sebelumnya sama saja dengan pemilu yang sedang berlangsung. Pemilih yang awam akan politik tidak jarang golput karena beranggapan setelah memilih pada pemilihan sebelumnya mereka tidak perlu lagi datang memilih.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terjadi kejenuhan memilih yang dirasakan masyarakat dengan pemilihan umum yang beruntun. Juga terdapat pemikiran rasional yang dilakukan oleh pemilih bahwasanya masih banyak kegiatan produktif yang bisa dilakukan dari pada meliburkan hari kerja hanya untuk datang memilih. Serta pemikiran mereka terhadap pemilihan umum yang terlalu sering dilaksanakan dapat menghamburkan uang negara dikarenakan pelaksanaannya yang memakan waktu berbulan-bulan serta membutuhkan banyak tenaga.

## Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Golongan Putih pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014

### 1. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang enggan untuk datang ke TPS untuk memilih. Sebagian besar berpendapat bahwa pergi ke TPS hanya untuk mencoblos tidak terlalu efektif. Sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi serta berpendidikan lebih tinggi cenderung apatis terhadap pemilihan. Mereka berpendapat bahwa pemilihan tidak akan merubah status sosial mereka sehingga



pergi ke TPS hanya hal yang dianggap sepele bagi mereka.

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa masyarakat secara tidak langsung memprotes sistem atau proses pemilihan umum yang diselenggarakan. Protes yang dilakukan ini dalam bentuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan. Hal ini sebelumnya telah dikemukakan oleh Indra J Piliang dalam *Political Xplore* bahwa dalam kasus ini masyarakat yang golput politis yakni kelompok yang masih percaya kepada negara serta pemilihan umum, namun memilih golput dikarenakan preferensi politik yang berubah atau akibat sistem yang merugikan mereka.

Sebagian besar orang beranggapan bahwa masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih rendah cenderung golput dikarenakan mereka lebih memilih untuk melakukan pekerjaan mereka dari pada datang ke TPS untuk memilih namun pada kenyataannya masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas akan lebih cenderung bersikap apatis terhadap golput dikarenakan kesibukan mereka.

Dari dua hasil wawancara di atas dapat dibuktikan bahwa golput tidak hanya cenderung berasal dari kalangan menengah ke bawah ada pula kalangan masyarakat dengan status sosial yang agak bawah sangat bersemangat dalam menyalurkan hak suara yang dimilikinya. Hal ini juga dapat dibuktikan dalam salah satu hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei yakni IDEC (*Indonesian Development Engineering Consultant*). Dari hasil temuan IDEC (*Indonesian Development Engineering Consultant*) ketika melakukan penelitian menyangkut sikap pemilih pada April-September, sebesar 20,25% profil responden yang menyatakan secara terbuka sejak bulan April, akan memilih

menjadi golongan putih (golput) adalah dari kalangan menengah.

Masyarakat yang berperilaku seperti ini sesuai dengan golongan pertama pada pendapat Novel Ali yakni di Indonesia terdapat dua kelompok golput. *Pertama*, adalah kelompok golput awam, yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. *Kedua*, adalah kelompok golput pilihan yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik.

Berdasarkan dua hasil wawancara yang diuraikan sebelumnya dapat di bandingkan alasan mereka golput. Alasan masyarakat dengan pendidikan menengah ke atas akan lebih kepada analisis pasangan calon ataupun visi misi calon, namun alasan yang dikemukakan oleh kalangan yang berpendidikan rendah cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi semata.

Keadaan partai politik serta aktor yang berperan didalamnya sering kali tidak memenuhi keinginan masyarakat serta menampilkan hal-hal yang membuat masyarakat lebih memilih untuk tidak mempergunakan hak pilihnya pada pemilihan yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kacung Marijan mengenai ada beberapa faktor seseorang tidak datang memilih salah satunya adalah turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dikarenakan menurunnya *performance* dari pemerintah itu sendiri.

## 2. Faktor Psikologis

Faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. *Pertama*, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. *Kedua*, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku *non voting* disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku *non voting* disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomis, dan alienasi.

Pada faktor psikologi ini lebih sesuai dengan faktor-faktor yang dikemukakan oleh Rosenberg yakni *pertama* bahwa individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya. *Kedua*, bahwa konsekuensi yang ditanggung dari suatu aktifitas politik mereka sebagai pekerjaan sia-sia. *Ketiga*, beranggapan bahwa memacu diri untuk tidak terlibat atau sebagai perangsang politik adalah sebagai faktor yang sangat penting untuk mendorong aktifitas politik.

Perilaku pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya atas dasar faktor psikologi sesungguhnya bukan tanpa alasan yang mendasar. Masyarakat merasa bahwa pada saat kampanye semua calon anggota legislatif berusaha mendekati mereka dengan segala cara yang ada, namun pada saat sudah menduduki jabatan mereka lebih mementingkan dirinya ataupun partai yang mengusungnya.

Ada pula masyarakat yang menganggap bahwa kedekatan dengan

salah satu calon anggota legislatif dapat membahayakan situasi sosial serta ekonominya hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Rosenberg bahwa individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya sehingga mereka lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Kapuas.

Beberapa hal yang mempengaruhi sikap golput masyarakat dari faktor psikologi. Sikap acuh, tidak percaya, kecewa serta yang lainnya dapat menimbulkan rasa keengganan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Faktor psikologis masyarakat khususnya trauma politik menjadi faktor penyebab terjadinya golput dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Kapuas.

### 3. Faktor Rasional

Faktor rasional meliputi cara berfikir pemilih yang mempertimbangkan untung serta ruginya dia memilih. Faktor pilihan rasional telah diungkapkan sebelumnya oleh Olson dan Down, “tidak adanya kemauan mayoritas orang untuk berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka. Mereka mengkalkulasi-kal segala sesuatu berdasarkan pertimbangan untung dan rugi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa pertimbangan dan pemikiran masyarakat terhadap pilihan yang akan diberikan memiliki kriteria tertentu menurut masing-masing pemilih ada pula pemilih yang sudah enggan lagi untuk ikut berpartisipasi karena menganggap partai politik serta aktor-aktor yang berperan di dalamnya tidak mewakili masyarakat lagi mereka hanya sibuk bertarung memperebutkan kekuasaan

dan apabila sudah menduduki jabatan mereka akan lebih sibuk untuk membagi-bagi kekuasaan yang telah di peroleh.

Pada hasil wawancara ini golongan yang golput dengan alasan faktor rasioanal cenderung berubah arah menjadi orang yang akan dengan mudahnya akan menerima segala bentuk sogokan dari tim sukses calon anggota legislatif tertentu. Jika golput dengan alasan ini dibiarkan begitu saja maka akan berdampak negatif terhadap pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Kapuas ke depannya.

Untuk itu perlu upaya dari penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kapuas untuk terus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum di Kabupaten Kapuas.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

1. Gambaran golput pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Kapuas:
  - a. Golput ideologis dimana masyarakat sudah tidak mempercayai sama sekali terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.
  - b. Golput politis dimana masyarakat kurang mendapat referensi calon anggota legislatif yang sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan sehingga menyebabkan mereka tidak memilih alias golput.
  - c. Golput pragmatis dimana golput jenis ini mengkalkulasi untung serta ruginya masyarakat terlibat

dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Kapuas.

Adapun jenis golput yang dominan di pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Kapuas adalah golput politis serta golput pragmatis.

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab golput ada tiga yakni:
  - a. Faktor sosial-ekonomi, pemilih memilih golput ketika mereka tidak menemukan pasangan yang menjadi representasi dari kepentingannya. Sedangkan alasan masyarakat menengah ke atas akan lebih kepada analisis calon anggota legislatif ataupun visi misi calon anggota legislatif.
  - b. Faktor psikologis disebabkan terjadi kejenuhan memilih di kalangan masyarakat yang merasa bahwa pemilu yang diadakan terlalu banyak dan beranggapan bahwa seharusnya pemilu dilaksanakan secara serentak.
  - c. Faktor rasional masyarakat akan lebih mempertimbangkan untung rugi mereka ketika datang memilih.

Faktor yang dominan menyebabkan golput pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Kapuas yakni faktor psikologis.

### Saran:

1. Untuk mengatasi golput ideologis dapat dilakukan dengan cara memperbaiki citra pemerintahan di mata masyarakat serta melakukan pendekatan persuasif.
2. Untuk mengatasi golput politis dapat dilakukan dengan cara memberikan representasi calon anggota legislatif

- yang lebih meyakinkan serta sesuai dengan kriteria masyarakat.
3. Untuk mengatasi golput pragmatis dapat dilakukan dengan cara pemilihan umum anggota legislatif secara serentak untuk mengatasi kejenuhan pemilih, serta terus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik.
  4. Untuk mengatasi faktor sosial-ekonomi hendaknya lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang lebih gencar dalam mensosialisasikan pemilu dan melakukan pendidikan politik masyarakat.
  5. Untuk mengatasi faktor psikologis lebih baik apabila partai politik yang mengikuti proses pemilihan umum memperbaiki kualitas kader dan kualitas partai politik.
  6. Untuk mengatasi faktor rasional hendaknya KPUD Kabupaten Kapuas terus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik akan arti penting partisipasi politik masyarakat, serta bekerjasama dengan Banwaslu menindak tegas praktek *money politic*.
- Reshaping Our Lives*. London: Profile Books.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan M, (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Kacung, Marijan. (2006). *Demokratisasi di Daerah*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Mas'oe'd, Mohtar dan MacAndrews. (2001) *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putra, Fadillah. (2003). *Partai politik dan kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rush, Michael dan Althoff, Phillip (1989). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rajawali.
- Sanit, Arbi. (1992). *Aneka Pandangan Fenomena Politik: Golput*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sastroadmojo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

## Referensi

- Ali, Novel. (1999). *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ambardi, Kuskridho. (2009). *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efriza. (2012). *Political Explore*. Bandung: Alfabeta.
- Giddens, Anthony. (1999). *Runaway World, How Globalisation is*